ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Magersari, Sidoarjo."Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan bagaimana bentuk tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Magersari, Sidoarjo dan bagaimana Analisis Hukum Islam dan UUPK terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Magersari, Sidoarjo.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak PT. Pos Indonesia dan konsumennya. Setelah itu data yang diperoleh disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, kemudian dianalisis dengan denganpolapikirdeduktif, yaknimendiskripsikanteoriyang bersifat umum menjadi data–data yang bersifat khusus dan logis atas data yang berhasil dihimpun dari pihak pos dan konsumen yang dirugikan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab pihak Pos terhadap konsumenadalahdenganmemberikan ganti rugi atas setiap kerusakan, keterlambatan, atau bahkan kehilangan barang kiriman. Ganti rugi ini hanyauntuk pembayaran di atas Rp. 300.000,-dalamsatufaktur. Pihak Pos juga memberikan kesempatan kepada para pengguna jasa pos untuk menyampaikan keluhan dan pendapatnya melalui *customer service*maupun*via call center*. Dalam analisis hukum islam, tanggung jawab pihak pos tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep *ija>rah*, terutama yang berkenaan dengan batas minimal akad yang mendapat ganti rugi. Hal ini juga senada jika dianalisis berdasakan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentangperlindungankonsumen (UUPK). Pasal 19 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan dan kerugian konsumen, namun dalam prakteknya pihak Pos hanya akan memberikan ganti rugi kepada konsumen dengan pembayaran diatas Rp. 300.000,-dalam satu faktur.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pihak pos disarankan untuk: melakukan perubahan batas minimum transaksi yang mendapat ganti rugi. Bagi konsumen, diharapkan untuk lebih teliti lagi terhadap klausul hak dan kewajiban sehingga tak ada lagi konsumen yang terus merasa dirugikan karena dilanggar haknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id